

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi.....	iii-iv
Abstrak.....	v-x
Mengapa Indonesia Sangat Rawan Dari ISIS/IS? <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	145-173
Countering Terrorists in Southeast Asia: The Hardline Approach <i>oleh: Arya Sandhiyudha</i>	174-188
Identitas Nasional dan Norma Internasional sebagai Pertimbangan Politik Indonesia dalam Merespons Aksi dan Jaringan Terorisme Global <i>oleh: Hidayat Chusnul Chotimah</i>	189-209
Tata Kelola Dunia Maya dan Ancaman Kedaulatan Nasional <i>oleh: Indra Cahyadi</i>	210-232
<i>One Belt One Road (Obor): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok?</i> <i>oleh: Yandry Kurniawan</i>	233-254
Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia <i>oleh: Retnaningtyas Dwi Hapsari</i>	255-270
Indeks Penulis	
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Terbitnya *Jurnal Politica*, Volume 7, Nomor 2, November 2016 merupakan kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya. *Jurnal Politica* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI (sebelumnya bernama Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI), adalah wadah bagi tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada edisi kali ini terdapat 6 (enam) tulisan yang mengupas beberapa persoalan yang dibahas secara padat oleh beberapa penulis yang mengenai isu-isu strategis yakni tentang aksi terorisme di Indonesia dan dunia internasional, ancaman keamanan terhadap kedaulatan negara di dunia maya, kebijakan luar negeri Tiongkok dengan judul “*One Belt One Road*” serta nasionalisme Tionghoa di Indonesia masa kolonialisme Belanda.

Tulisan pertama disampaikan oleh Poltak Partogi Nainggolan berjudul “Mengapa Indonesia Sangat Rawan Dari ISIS/IS?” yang mengangkat persoalan kondisi Indonesia akhir ini yang menjadi sangat rawan atas serangan aksi-aksi terorisme. Temuan penelitian mengungkap banyaknya orang yang bergabung dengan ISIS/IS di Indonesia karena alasan ekonomis, geografis, demografis, maraknya kampanye radikal untuk melakukan aksi-aksi terorisme di media sosial, serta kekosongan dan lemahnya penegakan hukum di tanah air. Penulis merekomendasikan upaya pengentasan kemiskinan, pembuatan Undang-undang anti-terorisme dan penegakan hukum yang lebih baik dan konsisten, selain perlunya kampanye deradikalisasi sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan tahun 2016, dengan pengumpulan data di Jakarta, Palu, Poso, dan Aceh.

Tulisan kedua disampaikan oleh Arya Sandhiyudha yang berjudul “*Countering Terrorists in Southeast Asia: The Hardline Approach*” atau “Kontra Terorisme Di Asia Tenggara: Pendekatan *Hardline*”. Tulisan ini mengangkat respons instrument represif negara dalam perang global melawan terror berbasis agama di negara-negara Asia Tenggara. Tulisan ini mengambil fokus pada empat negara, yakni Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis militer yang diterapkan di Filipina merupakan pendekatan paling beresiko terhadap legitimasi pemerintahan di mata publik dunia, meskipun dianggap efektif melemahkan kapabilitas kelompok teroris. Sementara, pendekatan berbasis intelijen meskipun berhasil menetralkan kelompok teroris dengan meminimalkan penggunaan persenjataan, namun dianggap terdapat banyak penyalahgunaan kewenangan sehingga melemahkan dukungan dan legitimasi dari kelompok-kelompok masyarakat luas. Di Indonesia, pendekatan berbasis penegakan hukum terbukti sukses meraih dukungan dan legitimasi publik meskipun tidak efektif melumpuhkan ancaman.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Hidayat Chusnul Chotimah berjudul “Identitas Nasional dan Norma Internasional sebagai Pertimbangan Politik Indonesia dalam Merespons Aksi dan Jaringan Terorisme Global” menyatakan bahwa perang global terhadap terorisme yang diprakarsai AS telah menjadi *norm entrepreneur* dengan dukungan pengaruh Dewan Keamanan PBB. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia harus melakukan proses internalisasi yang didasarkan pada identitas nasionalnya yaitu filsafat Pancasila dan konstitusi dasar negara Indonesia. Proses internalisasi sebagai wujud respons Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global melahirkan respons aktif-reaktif yaitu respons profesional dan respons politik.

Tulisan keempat disampaikan oleh Indra Cahyadi yang berjudul “Tata Kelola Dunia Maya dan Ancaman Kedaulatan Nasional” melihat bahwa Perkembangan teknologi internet turut meningkatkan jumlah dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara di dunia maya. Hal ini terkait dengan masalah keamanan nasional setiap negara maupun internasional, terutama setelah Edward Snowden mengungkapkan program pengawasan rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Penulis memaparkan perdebatan internasional mengenai tata kelola dunia maya dan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan kedaulatan di dunia maya, serta strategi yang sudah dilakukan Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa China dan Amerika Serikat telah menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan untuk memandu tata pemerintahan dunia maya global. Oleh karena itu, Indonesia harus segera menyusul dan bertindak secara teritegrasi agar dapat melindungi dan menjaga kedaulatannya di dunia maya secara efisien.

Tulisan kelima disampaikan oleh Yandry Kurniawan yang membahas kebijakan luar negeri Tiongkok dengan judul “*One Belt One Road: Agenda Keamanan Liberal Tiongkok?*”. Pemerintah Tiongkok saat ini tengah gencar menawarkan ‘*One Belt, One Road (OBOR)*’ sebagai mekanisme kerja sama multilateral lintas kawasan, yang meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika hingga ke Eropa Timur. Dengan menggunakan sudut pandang pemikiran liberal sebagai kerangka analisis, Penulis menyimpulkan inisiatif OBOR sebagai agenda pemerintah Tiongkok untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan. Stabilitas keamanan kawasan merupakan syarat penting bagi Tiongkok untuk menjaga kebangkitannya dalam kancah politik internasional. Melalui mekanisme multilateral pemerintah Tiongkok pada dasarnya mengajak negara-negara di kawasan untuk terlibat aktif dalam berbagi peran (*division of labor*) dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas kawasan dengan kerja sama ekonomi sebagai sektor penjurur.

Yang terakhir, tulisan keenam ditulis oleh Retnaningtyas Dwi Hapsari yang berjudul “Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia”, membahas keterkaitan antara reformasi pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Penulis menyimpulkan adanya diskriminasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonialisme menyebabkan terjadinya perpecahan dan dualisme nasionalisme terjadi di dalam tubuh penduduk Tionghoa pada masa tersebut.

Demikianlah pengantar redaksi atas 6 (enam) tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Redaksi berharap agar semua tulisan yang tersaji pada edisi kali ini dapat memberikan inspirasi, menjadi bahan informasi, serta menjadi alternatif solusi dalam proses pengambilan keputusan dan/ atau bagi pembaca secara keseluruhan yang tertarik dengan isu-isu dimaksud. Namun demikian, redaksi menyadari jika masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin tersaji dalam edisi kali ini. Untuk itu, redaksi berharap agar pembaca memberikan masukan atas sajian jurnal ini pada umumnya dan tulisan-tulisan ini pada khususnya. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si., Dr. Ganewati Wuryandari, keduanya Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Yandri Kurniawan dari FISIP Universitas Indonesia dan Dr. Riant Nugroho dari FIA Universitas Indonesia sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, November 2016
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Mengapa Indonesia Sangat Rawan Dari ISIS/IS?

Maraknya pengaruh dan serangan ISIS/IS di Indonesia dewasa ini telah memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia menjadi sangat rawan atas serangan aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS? Esai ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptis-analitis, yang dilakukan di daerah Jakarta, Palu, Poso, dan Aceh pada tahun 2016. Di samping studi kepustakaan, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para ahli terorisme dan aparat keamanan di wilayah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkap banyaknya orang yang bergabung dengan ISIS/IS di Indonesia karena alasan ekonomis, geografis, demografis, maraknya kampanye radikal untuk melakukan aksi-aksi terorisme di media sosial, serta kekosongan dan lemahnya penegakan hukum di tanah air. Penulis merekomendasikan upaya pengentasan kemiskinan, pembuatan Undang-undang anti-terorisme dan penegakan hukum yang lebih baik dan konsisten, selain perlunya kampanye deradikalisasi.

Kata kunci: ISIS/IS, Indonesia, terorisme, Bom Sarinah, Poso, Aceh.

Poltak Partogi Nainggolan

Why Indonesia Is So Vulnerable From ISIS/IS?

The increasing attacks of Indonesian pro-ISIS/IS (Islamic State in Iraq and Suriah/Islamic State) terrorists has stirred questions on why their influences can easily spread and so vulnerable in Indonesia? This essay is developed from 2016 descriptive-analytical research conducted in Jakarta, Palu, Poso, and Aceh. Data was collected from library studies and in-depth interviews with terrorism experts, academicians, and security apparatus in respected cities. Data has been further analyzed by exercising qualitative method. Research findings revealed that ISIS/IS new recruits or followers in Indonesia join the terrorist group for economic reason due to the rising increase of poverty, economic gap and social injustice. The success of recruitments has also helped by geographical and demographical reasons, as well as weak and inconsistent law enforcement and the success of ISIS/IS international radicalization and terrorism campaign using social media. The writer then recommends poverty elevation and amendments of anti-terrorism law and better improvement of law enforcement, in addition to the need to push deradicalization campaign.

Keywords: ISIS/IS, Indonesia, terrorism, Sarinah Bombing, Poso, Aceh.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Arya Sandhiyudha

Countering Terrorists in Southeast Asia: The Hardline Approach

The Global War on Terror discourse in Southeast Asian countries has been responded in various ways in order to face religious-motivated terrorism. Among those, there are hardline approaches in state level classified as military-focused, intelligence-focused, and law enforcement-focused approaches. Each has different policy backgrounds and is influenced by different actors. The analysis on each's strength and weakness is presented in this writing by focusing on four countries, i.e Philippines, Singapore, Malaysia, and Indonesia. The result shows that military-focused approach implemented in Philippines has proven as the most risky one even though has also proven as effective to paralyse terrorist group capability. Meanwhile, the use of excessive power undermines many achievement of intelligence-focused approach in Singapore and Malaysia. In both countries, neutralizing the terrorist groups is achieved by using less firepower, then decreasing the support and legitimacy of the groups in wider society. In Indonesia herself, law enforcement-focused approach has proven gaining success even though the terrorism threats remain.

Keywords: counter terrorism, hardline approach, military, intelligence, law enforcement.

Arya Sandhiyudha

Kontra Terorisme di Asia Tenggara: Pendekatan Hardline

Wacana Perang Global Melawan Teror di negara-negara Asia Tenggara telah direspons dengan ragam cara dalam rangka menghadapi terorisme berbasis motivasi keagamaan. Diantaranya, terdapat pendekatan dengan menggunakan instrumen represif negara seperti: pendekatan berbasis militer, pendekatan berbasis intelijen, dan pendekatan berbasis penegakan hukum. Setiap kebijakan memiliki perbedaan latar belakang dan dipengaruhi oleh ragam aktor-aktor keamanan. Analisa atas keunggulan dan kekurangan diuraikan dalam tulisan ini dengan mengambil fokus pada empat negara, yakni Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Elaborasi tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis militer yang diterapkan di Filipina merupakan pendekatan paling beresiko terhadap legitimasi pemerintahan di mata publik dunia, meskipun dianggap efektif melemahkan kapabilitas kelompok teroris. Sementara, pendekatan berbasis intelijen meskipun berhasil menetralkan kelompok teroris dengan meminimalkan penggunaan persenjataan, namun dianggap terdapat banyak penyalahgunaan kewenangan sehingga melemahkan dukungan dan legitimasi dari kelompok-kelompok masyarakat luas. Di Indonesia, pendekatan berbasis penegakan hukum terbukti sukses meraih dukungan dan legitimasi publik meskipun tidak efektif melumpuhkan ancaman.

Kata kunci: kontra terorisme, pendekatan hardline, militer, intelijen, penegakan hukum.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hidayat Chusnul Chotimah

Identitas Nasional dan Norma Internasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia dalam Merespons Aksi dan Jaringan Terorisme Global

Amerika Serikat telah menginisiasi pembentukan norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme melalui slogan “*global war on terror*” dan bertindak sebagai *norm entrepreneur* dalam meluaskan slogan tersebut melalui pengaruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan sejumlah resolusi untuk menangani aksi dan jaringan terorisme. Siklus pembentukan norma internasional terkait penanggulangan terorisme ini diawali dengan *norm emerge* yang muncul dari tahun 1990-an, yang kemudian diikuti dengan *norm cascade* dalam rangka menyebarluaskan norma tersebut secara global, serta proses internalisasi. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia juga melakukan proses internalisasi yang didasarkan pada identitas nasionalnya yaitu filsafat Pancasila dan konstitusi dasar negara Indonesia. Proses internalisasi sebagai wujud respons Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global melahirkan respons aktif-reaktif yaitu respons profesional dan respons politik.

Kata kunci: identitas nasional, norma internasional, Indonesia, terorisme global.

Hidayat Chusnul Chotimah

National Identity and International Norm as Indonesia's Political Consideration in Response with Actions and Network of Global Terrorism

United States has initiated the formulation of international norms for combating terrorism under its “global war on terror” policy and acted as a norm entrepreneur by using its influence in United Nations Security Council. The UN Security Council subsequently issued a number of resolutions to handle action and networks of global terrorists. The cycle of international norm for combating terrorism is consisted of norm emerge of 1990s, which is followed by norm cascade to spread the norm globally, and internalization process to set the domestic policy. As UN member, Indonesia also made the internalization process based on national identity, namely the philosophy of Pancasila and state constitution. The internalization process as the manifestation of Indonesia's response in combating global terrorism has brought about an active-reactive response, e.g. professional response and a political response.

Keywords: national identity, international norm, Indonesia, global terrorism.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Indra Cahyadi

Tata Kelola Dunia Maya dan Ancaman Kedaulatan Nasional

Perkembangan teknologi internet memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, teknologi internet juga turut meningkatkan jumlah dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara di dunia maya. Kedaulatan di dunia maya menjadi topik penting dalam pembahasan keamanan nasional maupun internasional, terutama setelah Edward Snowden mengungkapkan program pengawasan rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Artikel ini bertujuan untuk memahami perdebatan internasional mengenai tata kelola dunia maya dan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan kedaulatan di dunia maya. Untuk itu, artikel ini membahas isu-isu terkait kedaulatan di dunia maya termasuk; konsep kedaulatan di dunia maya, tantangan dalam pembentukan tata pemerintahan dunia maya yang berdasarkan kesetaraan kedaulatan, serta strategi yang sudah dilakukan Indonesia dalam menegakan kedaulatan di dunia maya. Artikel ini berkesimpulan bahwa China dan Amerika Serikat telah menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan untuk memandu tata pemerintahan dunia maya global, dan oleh karena itu Indonesia harus segera menyusul dan bertindak secara terintegrasi agar dapat melindungi dan menjaga kedaulatannya di dunia maya secara efisien.

Kata kunci: keamanan *cyber*, kedaulatan nasional, keamanan nasional, tata kelola pemerintahan.

Indra Cahyadi

Cyber Governance and Threat of National Sovereignty

The significant growth of internet technology has the potential to promote economic growth. On the other hand, it also causes increasing threats to state's sovereignty in cyber world. Sovereignty in cyberworld, or cyber sovereignty, has become an important topic of both national and international security, especially after Edward Snowden's disclosure of the secret surveillance programs of the government of the United States of America. This article aims to understand the current international disputes over governance in cyberworld and to identify challenges and threats in cyber sovereignty. This article discusses the cyber sovereignty issues including; concept of sovereignty in cyberworld, challenges in process of building cyberspace governance based on sovereign equality, as well as Indonesia's strategy in exercising cyber sovereignty. It finds that China and USA have applied cyber sovereignty principles to guide the governance of global cyberspace, and Indonesia must follow and act in integrative manner to efficiently protect and safeguard its cyber sovereignty.

Keywords: cyber security, national sovereignty, national security, governance.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Yandry Kurniawan

One Belt One Road (Obor): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok?

Tulisan ini membahas Inisiatif 'One Belt, One Road (OBOR)' yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok sebagai mekanisme kerja sama multilateral lintas kawasan, yang meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika hingga ke Eropa Timur. Inisiatif OBOR ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan gagasan kerja sama multilateral yang paling ambisius yang pernah ditawarkan oleh satu negara. Dari segi geografis, kerja sama OBOR akan lebih besar dari Uni Eropa dan hanya akan lebih kecil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak melihat inisiatif OBOR dengan menggunakan sudut pandang ekonomi-politik, dinamika politik domestik Tiongkok, dan kajian kawasan tanpa mengulas lebih dalam aspek paradigmatik yang mendasari pemikiran dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah Tiongkok melalui gagasan ini. Dengan menggunakan sudut pandang pemikiran liberal sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai inisiatif OBOR sebagai agenda pemerintah Tiongkok untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah stabilitas keamanan kawasan merupakan syarat penting bagi Tiongkok untuk menjaga kebangkitannya dalam kancah politik internasional. Melalui mekanisme multilateral pemerintah Tiongkok pada dasarnya mengajak negara-negara di kawasan untuk terlibat aktif dalam berbagi peran (*division of labor*) dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas kawasan dengan kerja sama ekonomi sebagai sektor penjurur.

Kata kunci: OBOR, Tiongkok, agenda keamanan liberal, keamanan kawasan.

Yandry Kurniawan

One Belt One Road (OBOR): China's Liberal Security Agenda?

This article discusses the 'One Belt, One Road' (OBOR) initiative, proposed by the Chinese government as a cross-continental multilateral cooperation which spans from East Asia, Southeast Asia, South Asia, West Asia, Africa all the way to Eastern Europe. This makes OBOR the most ambitious multilateral cooperation, in terms of geography, ever initiated by a single country. It is bigger than the European Union and second only to the United Nations. Given this empirical significance, a theory-guided conceptual understanding of OBOR is necessary. Most of the existing studies on OBOR, however, put emphasize on more practical issues by employing political-economic, China's domestic interest, and area studies perspectives. Few, if any, examines the theoretical background of OBOR in order to scrutinize strategic objective that the Chinese government attempts to pursue through this initiative. By using liberal approach on security, this article frames OBOR as the Chinese government's agenda for maintaining and improving cross-continental stability. This article argues that the political-security stability is one of China's imperative interests amidst its rising power and global influence. Hence, through OBOR, China seeks to engage countries along the Belt and Road to actively contribute in maintaining cross-continental stability through the multilateral economic cooperation.

Keywords: OBOR, China, liberal security agenda, regional security.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Retnaningtyas Dwi Hapsari

Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia

Tulisan naratif ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara reformasi pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Pembahasannya meliputi pelopor pergerakan, dampak reformasi pendidikan, dan peran komunitas Tionghoa dalam upaya kemerdekaan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peristiwa yang telah lama terjadi, yang menggunakan metode sejarah, bertumpu pada empat hal yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adanya diskriminasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda membuat pendirian sekolah Tionghoa secara mandiri yang diprakasi oleh sebuah organisasi. Jalinan kerjasama antara sekolah ini dengan negeri China menimbulkan kecurigaan tentang orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Dualisme nasionalisme terjadi di dalam tubuh penduduk Tionghoa, adanya yang memihak kepada negeri China, adanya tetap setia kepada Belanda, tetapi ada pula yang memihak ke Indonesia. Perpecahan ini membuat penduduk Tionghoa sulit untuk dapat membuat suatu kesepakatan baik dalam bidang pendidikan maupun politik.

Kata kunci: reformasi pendidikan, nasionalisme, diskriminasi, penduduk Tionghoa, Indonesia, China.

Retnaningtyas Dwi Hapsari

Nationalism Breeding among Chinese Population In Indonesia

This narrative article is intended to determine the relationship between education reform during the Dutch East Indies against nationalist orientation of Chinese. The discussions in this paper mainly focuses issues on pioneer movement, impact of educational reform, and the Chinese community's role in Indonesia's independence efforts. This paper is written based on is the results of the research on the events. It applies historical method, which is based on four issues, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Discrimination education do the Dutch government to make the establishment of independent Chinese schools were pioneered by an organization. The partnership between these schools with the country of China raised suspicions about the nationalist orientation of Chinese. Dualism nationalism going on inside of Chinese, their sided with the country of China, their stay loyal to the Netherlands, but some are aligned to Indonesia. This split makes it difficult for the Chinese to make a good deal in the field of education and politics.

Keywords: educational reform, nationalism, ethnic discrimination, Chinese minority, Indonesia, China.